

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kajian Pustaka

Dengan mengacu pada penelitian terdahulu, yang sejenis maupun berbeda dengan pokok permasalahan yang akan di bahas maka kajian pustaka yang dijadikan pertimbangan ini antara lain:

Sutrisno Cessario (2013), dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari variabel pengaruh jumlah obyek wisata terhadap pendapatan retribusi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu dijelaskan bahwa variabel jumlah obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien 1043949 terhadap pendapatan retribusi pariwisata kabupaten/kota Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila obyek wisata suatu daerah mengalami peningkatan sebesar 1 obyek wisata, maka akan meningkatkan pendapatan retribusi di Jawa Tengah sebesar 1,043,949 rupiah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh positif terhadap pendapatan retribusi pariwisata yang dilihat dari jumlah obyek wisata kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 2007 sampai 2011. Dan variabel pengaruh jumlah hotel terhadap pendapatan retribusi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah menyimpulkan bahwa variabel jumlah hotel memiliki nilai koefisien sebesar 53776,97 berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi pariwisata kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2007 sampai 2011. Hal ini menunjukkan

bahwa apabila jumlah hotel mengalami peningkatan sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan pendapatan retribusi kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 53776,97 rupiah. Hasil ini sesuai hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh positif dari jumlah retribusi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dilihat dari jumlah hotel 35 kabupaten/kota selama tahun 2007-2011.

Shella (2014), berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan dari variabel jumlah wisata mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Banda Aceh periode 1997-2012. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Sedangkan variabel obyek wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di kota Banda Aceh periode tahun 1997-2012. Dan variabel jumlah hotel dan lama tinggal wisatawan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Banda Aceh periode 1997-2011. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Suartini (2011), berdasarkan hasil penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan, Pajak Hiburan dan PHR secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun 1991-2010. Jumlah kunjungan wisatawan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun 1991-2010. Pajak Hotel dan Restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun anggaran 1991-2010. Diantara ketiga variabel yaitu

jumlah kunjungan wisatawan, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel dan Restoran, yang paling dominan berpengaruh terhadap PAD adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang dihasilkan suatu daerah menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.2. Penerimaan Daerah**

Pengertian penerimaan pemerintah dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko,2002). Demikian pula dengan keuangan daerah, tidak jauh dengan ketentuannya, hanya objek dari keuangan daerah mempelajari segi penerimaan daerah administrasinya. Elemen-elemen penerimaan daerah dalam otonomi daerah diatur berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya sebagai hak otonomi yang

diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Mengingat bahwa tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah diharuskan untuk dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui binaan, bimbingan dan koordinasi pemerintah pusat.

### **2.2.3. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penerimaan Daerah**

Mewujudkan pembangunan nasional dan menjaga keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diperlukan keseragaman dan keselarasan prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintah daerah adalah (Ismail,2002)

1. Pelaksanaan pemberian ekonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi pejuang rakyat, yakni memperkokoh Negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan tugas pembantuan (*medebewind*).

4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek-aspek keserasian (harmoni) disamping asas pendemokrasian.
5. Tujuan pemberi otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas) penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

#### **2.2.4. Elemen-elemen Penerimaan Daerah**

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan, dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana atau uang, maka dari itu daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 157 Undang-Undang No. 32 tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **2.2.4.1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

#### **A. Pendapatan Pajak Daerah**

Pengertian pajak secara umum ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik untuk membiayai keperluan umum, dan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan (Yulianto,2011)

Menurut Kurniawan (2006) hasil penerimaan pajak kabupaten/kota, baik yang jenis pajaknya berdasarkan UU Pajak Daerah atau jenis pajaknya merupakan perluasan objek yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan.

#### **B. Hasil Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ciri-ciri Retribusi Daerah:

1. Retribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Sedangkan jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum

- a. Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jenis-jenis retribusi jasa umum yakni pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, dan pengujian kapal perikanan.
- c. Subjek retribusi jasa umum yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi jasa usaha

- a. objek retribusi jasa usaha yakni pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- b. Jenis-jenis retribusi jasa usaha yakni pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan/villa, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyebrangan diatas air, pengolahan limbah cair, dan penjualan produksi usaha daerah.

- c. Subjek retribusi jasa usaha yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi perizinan tertentu
    - a. Objek retribusi perizinan tertentu yakni kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
    - b. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yakni izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin trayek.
    - c. Subjek retribusi perizinan tertentu yakni orang/pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

### **C. Hasil Perusahaan Milik Daerah**

Hasil perusahaan milik daerah adalah pendapatan dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.



#### **D. Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Pendapatan yang sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada PPKD, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan.

#### **2.2.5. Pengertian Pariwisata**

Menurut Wahab (1988) Pariwisata merupakan salah satu industri baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Selanjutnya, sebagai sector yang kompleks, juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industry kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri. Menurut Spillane (1987:87-88) ada beberapa sifat yang khusus mengenai industry pariwisata yaitu:

- a. Produk wisata tidak dapat dipindahkan. Orang tidak dapat membawa produk wisata pada langganan. Tetapi langgana itu sendiri harus mengunjungi, mengalami dan datang untuk menikmati produk wisata itu sendiri.
- b. Dalam pariwisata produksi dan konsumsi terjadi pada waktu yang sama. Tanpa langganan yang sedang mempergunakan jasa-jasa itu tidak akan terjadi konsumsi.

- c. Sebagai suatu jasa, maka pariwisata memiliki berbagai ragam bentuk. Oleh karena itu dalam bidang pariwisata tidak ada ukuran yang objektif, sebagaimana produk lain yang nyata misalnya ada panjang, lebar, isi, kapasitas, dan sebagainya pada sebuah mobil.
- d. Langgan tidak dapat mencicipi produk itu sebelumnya bahkan tidak dapat mengetahui atau menguji produk itu sebelumnya. Yang dapat dilihat hanya brosur-brosur dan gambar-gambar.

Dari segi usaha, produk wisata merupakan usaha yang mengandung resiko besar. Industry wisata memerlukan penanaman modal yang besar, sedang permintaan sangat peka terhadap perubahan situasi ekonomi, politik, sikap masyarakat atau kesenangan wisatawan dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut dapat menggoyahkan sendi-sendi penanaman modal usaha kepariwisataan karena bisa mengakibatkan kemunduran usaha yang deras, sedangkan sifat produksi itu relative lambat untuk menyesuaikan keadaan pasar.

#### **2.2.5.1. Klasifikasi**

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata. Termasuk obyek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan Kepariwisata, usaha pariwisata digolongkan kedalam:

1. Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri atas:

- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata
  - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata
  - c. Jasa Pramuwisata
  - d. Jasa konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran
  - e. Jasa Konsultan Pariwisata
  - f. Jasa informasi Pariwisata
2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dikelompokkan dalam:
- a. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam
  - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya
  - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tari Wisata Minat Khusus
3. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :
- a. penyediaan Akomodasi
  - b. Penyediaan Makan dan Minum
  - c. Penyediaan Angkutan Wisata
  - d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta
  - e. Kawasan Pariwisata

#### **2.2.5.2. Lingkup Kegiatan Usaha**

Berdasarkan penggolongan usaha pariwisata, secara garis besar lingkup kegiatan usaha dari masing-masing bidang usaha pariwisata adalah:

1. Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari:
  - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan

bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.

- b. Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai pelantara di antara penjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
- c. Usaha Jasa Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok yang melakukan perjalanan.
- d. Usaha Jasa Konvensi, perjalanan intensif dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, dsb.) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
- e. Jasa Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- f. Jasa Konsultan Pariwisata merupakan jasa yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk menyelenggarakan masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli yang profesional.

g. Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

## 2. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata

a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sarana wisata.

b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya yang merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sarana wisata.

c. Pengusahaan dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sarana wisata.

## 3. Usaha Sarana Wisata

a. Usaha penyediaan akomodasi merupakan penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.

b. Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengolahan. Penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.

c. Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian usaha dalam rangka menyediakan angkutan umumnya yaitu angkutan khusus wista atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.

- d. Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha menyediakan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan dilaut, sungai, danau, rawa dan waduk), demaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, selancar angin,berlayar, menyelam dan memancing.
- e. Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

#### **2.2.6. Jenis-jenis Pariwisata**

Walaupun banyak jenis pariwisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan yang terdapat didaerah tujuan wisata yang dapat menarik customer untuk mengunjunginya sehingga dapat diketahui jenis pariwisata yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah (Spillane, 1987:28-31):

- a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*peasure tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru, mengendorkan ketegangan syaraf, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, untuk menikmati hiburan dan sebagainya.

- b. Pariwisata untuk rekreasi

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahan.

c. Pariwisata untuk kebudayaan

Jenis pariwisata ini ditandai dengan adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup masyarakat Negara lain dan sebagainya.

d. Pariwisata untuk urusan bisnis

Dalam jenis pariwisata ini menekankan pada kesempatan waktu-waktu bebas pelaku perjalanan untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai obyek wisata dan jenis pariwisata lain.

e. Pariwisata untuk olahraga

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk olahraga, baik untuk hanya menarik penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditunjukan bagi mereka yang ingin mempraktekkannya sendiri.

f. Pariwisata untuk konvensi

Banyak negara yang tertarik dan menganggap jenis pariwisata ini dengan banyaknya hotel atau bangunan-bangunan yang khusus dilengkapi untuk menunjang pariwisata konvensi.

Menurut Mappi (2001:30-33) obyek wisata dikelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu :

1. Obyek wisata alam, misalnya: laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), flora (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam, dan lain-lain.
2. Obyek wisata budaya, misalnya: upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum, dan lain-lain.
3. Obyek wisata buatan, misalnya: sarana dan fasilitas olahraga, permainan, hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan, naik kuda, taman rekreasi, pusat-pusat pembelanjaan, dan lain-lain.

Menurut Spillane (1987), ada lima unsure industri pariwisata yang sangat penting, yaitu:

a. *Attractions* (daya tarik)

*Attractions* dapat digolongkan menjadi *site attractions* dan *event attractions*. *Site attractions* merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata seperti kebun binatang, keratin, dan museum. Sementara itu, *event attractions* adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasi dapat diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran, atau pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah.

b. *Facilities* (fasilitas-fasilitas yang diperlukan)

Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan wisata



wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum sehingga hal tersebut sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. Selain itu terdapat *Support Industries* yaitu toko *souvenir*, toko cuci pakaian, pemandu, daerah festival, dan fasilitas rekreasi (untuk kegiatan).

c. *Infrastructure* (infrastruktur)

Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur perlu untuk mendorong perkembangan pariwisata. Pariwisata dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan dan penduduk bukan wisatawan yang juga tinggal di sekitar obyek wisata. Pemenuhan atau menciptakan sarana yang cocok bagi perkembangan pariwisata.

d. *Transportations* (transportasi)

Dalam pariwisata, kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan krena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun laut merupakan suatu unsure utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata.

e. *Hospitality* (keramahtamahan)

Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi. Maka, kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga

keuletan serta keramahan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.

### **2.2.7. Peranan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah**

Pariwisata merupakan sektor yang terus berkembang, hal ini disebabkan adanya pergeseran nilai kebutuhan hidup. Artinya bagi masyarakat bahwa kegiatan kepariwisataan sudah merupakan suatu aktivitas dan permintaan yang wajar untuk dipenuhi. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa pariwisata dalam arti luas mencakup berbagai kegiatan, seperti kehidupan, sosial ekonomi, soaial budaya, politik dan lingkungan hidup masyarakat. (Yulianto,2011)

#### **2.2.7.1. Manfaat Ekonomi**

Pada umumnya di Negara sedang berkembang persoalan yang paling serius dihadapi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, yakni terbatasnya sumber-sumber dan pembangunan, sedangkan pertumbuhan tenaga kerja cukup tinggi. Untuk mengantisipasi kendala tersebut diperlukan tindakan seperti:

- a. Menggali sumber dana pembangunan dari luar negeri.
- b. Menggali sumber dana pembangunan dalam negeri dan dalam bentuk meningkatkan penerimaan Negara/daerah yang berasal dari pajak dan menggali potensi-potensi untuk meningkatkan retribusi.
- c. Meningkatkan kegiatan penanaman modal dibidang usaha, yang dapat menghasilkan devisa, meningkatkan penerimaan pajak/retribusi, meningkatkan

kegiatan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja.

Keterkaitan antar kegiatan pariwisata dengan kegiatan sektor-sektor lainnya saling terkait, misalnya dapat dijabarkan bagaimana pariwisata terkait dengan sektor hotel yang pada gilirannya juga terkait dengan sektor lainnya baik langsung maupun tidak langsung.

- a. Sektor industri kecil dan kerajinan.
- b. Sektor pertanian menyangkut kebutuhan pangan.
- c. Sektor perhubungan, yaitu menyangkut jasa angkutan udara, laut dan darat.
- d. Sektor pekerjaan umum menyangkut pembangunan gedung, jalan, dan prasarana konstruksi lainnya.
- e. Sektor pertambangan, yaitu menyangkut energy listrik dan gas.

Disamping itu kegiatan pariwisata terkait dengan kegiatan ekonomi lainnya seperti terciptanya usaha jasa catering, pemandu wisata, pramuwisata, biro perjalanan dan sanggar para seniman tradisional.

#### **2.2.7.2. Manfaat Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup**

Dari bidang sosial pariwisata jugamemberi manfaat ekonomi yang pergilirannya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada umumnya wisatawan dalam mengunjungi suatu daerah lebih cenderung untuk dapat melihat atau mengetahui seni budaya, keindahan alam dan suasana lingkungan yang tidak

dijumpai didaerahnya. Kebutuhan ini akan mendorong pengembangan nilai-nilai budaya, menghidupkan perkumpulan seni budaya tradisional. Pengembangan ini akan menunjang pertumbuhan industri kerajinan, industri rumah tangga dan lain-lain. Pembangunan sektor pariwisata tidaklah berdiri sendiri tetapi juga harus ditunjang peran serta masyarakat.

Dari uraian diatas maka peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha tidak hanya pada sektor pariwisata itu sendiri kan tetapi juga pada sektor lainnya baik secara langsung atau tidak langsung.
- b. Dapat meningkatkan/memperbaiki devisa pajak.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat didaerah tujuan wisata, hal ini akan lebih meningkatkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud.
- d. Penunjang pengembangan penerimaan daerah dari sektor lain, misalnya dengan sektor pariwisata dapat menunjang peningkatan penerimaan tontonan, pajak pengembangan 1, parker, IMB, PBB, PPN, dll.
- e. Menarik investasi untuk menanam modalnya didaerah wisata.
- f. Membangkitkan kepariwisataan dan cakrawala yang lebih luas.
- g. Mendorong pembangunan prasarana dan sarana.

#### **2.2.8. Hipotesis**

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka, yaitu landasan teori dan penelitian terdahulu, serta jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman guna melakukan penelitian. Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel jumlah wisatawan diduga memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di DIY.
2. Variabel jumlah obyek wisata diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di DIY.
3. Variabel jumlah hotel diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di DIY.
4. Variabel jumlah restoran diduga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di DIY.